

1.1 Latar Belakang

Kota Singkawang secara geografis terletak pada 0° 44' 55,85" – 01001'21,51' Lintang Utara (LU) dan 108° 51' 47,6" - 1090 10'19 Bujur Timur (BT) diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, dengan luas 504 Km² (50.400 ha). Masyarakat Tionghua dari suku *Khek/ Hakka* kata Singkawang berasal dari kata *Sau Kew Jong* berarti kota yang terletak diantara laut, muara, gunung dan sungai. Hal ini karena secara geografis sebelah barat Kota Singkawang berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Gunung Raya Pasi, Poteng dan Roban, sedangkan didalam kota terdapat sungai Singkawang yang bermuara ke Laut Natuna.

Kota Singkawang memiliki potensi yang cukup baik seperti daerah pesisirnya yang memiliki panjang garis sebesar 27,60 Km. Kekayaan Hayati yang cukup tinggi dengan adanya Cagar Alam Pasi-Raya-Poteng yang mencakup hampir 60 % luas wilayah masuk administrasi Kota Singkawang. Kota Singkawang memiliki lahan yang subur untuk pertanian dan juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk pertambangan, sehingga berpeluang untuk perekonomian berkembang dengan pesat. Dibalik keunikan dan keindahan serta perkembangan pembangunan yang cukup signifikan. Ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita yakni dengan adanya muncul pola-pola pertumbuhan pengembangan wilayah sehingga memicu memunculkan permasalahan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Singkawang.

Permasalahan ini bisa dipicu dari faktor alam maupun faktor manusia itu sendiri, sebagai contoh bahwa alam dengan sendirinya mempunyai respon terhadap perubahan yang terjadi akibat dari Perubahan Iklim global seperti terjadinya kenaikan air laut yang memicu gelombang tinggi dan dapat juga ROP (Pasang air laut), hal lainnya juga terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga terjadi waktu musin hujan yang sedikit dan musim kemarau yang panjang berakibat terjadinya kekeringan diberbagai tempat. Jika terjadi sebuah kelalaian dapat berakibat terjadinya kebakaran lahan maupun hutan karena terdapatnya Kota Singkawang juga memiliki kawasan gambut. Perbuatan manusia yang dapat berakibat negatif bagi alam yang cukup menarik yakni hampir setiap tahunnya terjadi kelangkaan air bersih akibat

dari minimnya pasokan air dari sumber-sumber air bersih yang disebabkan terjadi pengundulan daerah hulu yang dialih fungsikan sebagai lahan terbangun maupun pertanian/ perkebunan monokultur yang banyak menyerap air. Terjadi juga kebakaran hutan dan lahan akibat dilakukan pembakaran untuk perluasan areal sehingga muncul kabut asap yang sangat mengganggu fungsi organ pernapasan dan jarak pandang.

Potensi sumberdaya alam yang melimpah untuk pertambangan seperti mineral dan bebatuan juga tak kalah penting menjadi sebuah magnet yang cukup besar bagi pertumbuhan pembangunan di Kota Singkawang. Namun justru ini muncul terjadinya penyimpanan pengelolaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi pengupasan paksa daerah tutupan hijau dan lahan yang menimbulkan kerusakan lahan yang cukup parah seperti kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin. Dampak lainnya terjadi peningkatan penyebaran senyawa merkuri ke lingkungan dari akibat proses Penambangan dimaksud.

Posisi geografis yang cukup strategis ini sangat menguntungkan bagi Kota Singkawang karena merupakan tujuan dari investasi bisnis yang menjanjikan, hal ini diiring dengan semakin meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan yang secara langsung berakibat muncul aktivitas-aktivitas yang bervariasi serta menimbulkan polutan-polutan seperti sampah dan limbah cair baik di bidang rumah tangga, jasa perdagangan dan industri. Jika tidak segera diperhatikan dan masih minimnya kesadaran akan lingkungan dapat berakibat terjadinya peningkatan timbunan sampah serta beban pencemaran, terlebih lagi jika tidak dilakukan pengolahan dan langsung di buang ke badan air penerima yang berakibat terjadi peningkatan sedimentasi dan penurunan kuantitas dan kualitas badan air penerima tersebut.

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Sustainable Environment Management). Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten, melalui pendekatan holistik. Dengan demikian, setiap usaha meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan, perlu di dasari dengan semangat kebersamaan, kemitraan, keberlanjutan dan akuntabilitas pada semua pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutannya merupakan tugas bersama dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bertumpu pada kemitraan pemerintah

dan masyarakat. Upaya untuk memperluas jangkauan kepedulian dan kesadaran lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkan, agar dapat mengikat komitmen semua pihak yang terkait guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan panduan integratif untuk dapat secara nyata memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Singkawang pada khususnya.

Menjawab hal tersebut diatas, adalah tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Singkawang di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penyusunan/penetapan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan bertanggungjawab dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 7. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DLH Kota Singkawang;
 8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018– 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Menciptakan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembangunan Kota Singkawang
 2. Pedoman perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
 3. Menjadi dasar perumusan kebijakan skala prioritas pembangunan sektor Lingkungan Hidup dalam upaya tata kelola Lingkungan Hidup.
- b. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018– 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Tersusunnya rencana pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Singkawang.
 2. Tercapainya koordinasi perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup yang terintegrasinya sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan serta peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat di Kota Singkawang.

1.4 Sistematika Penulisan

Merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Sistematika Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

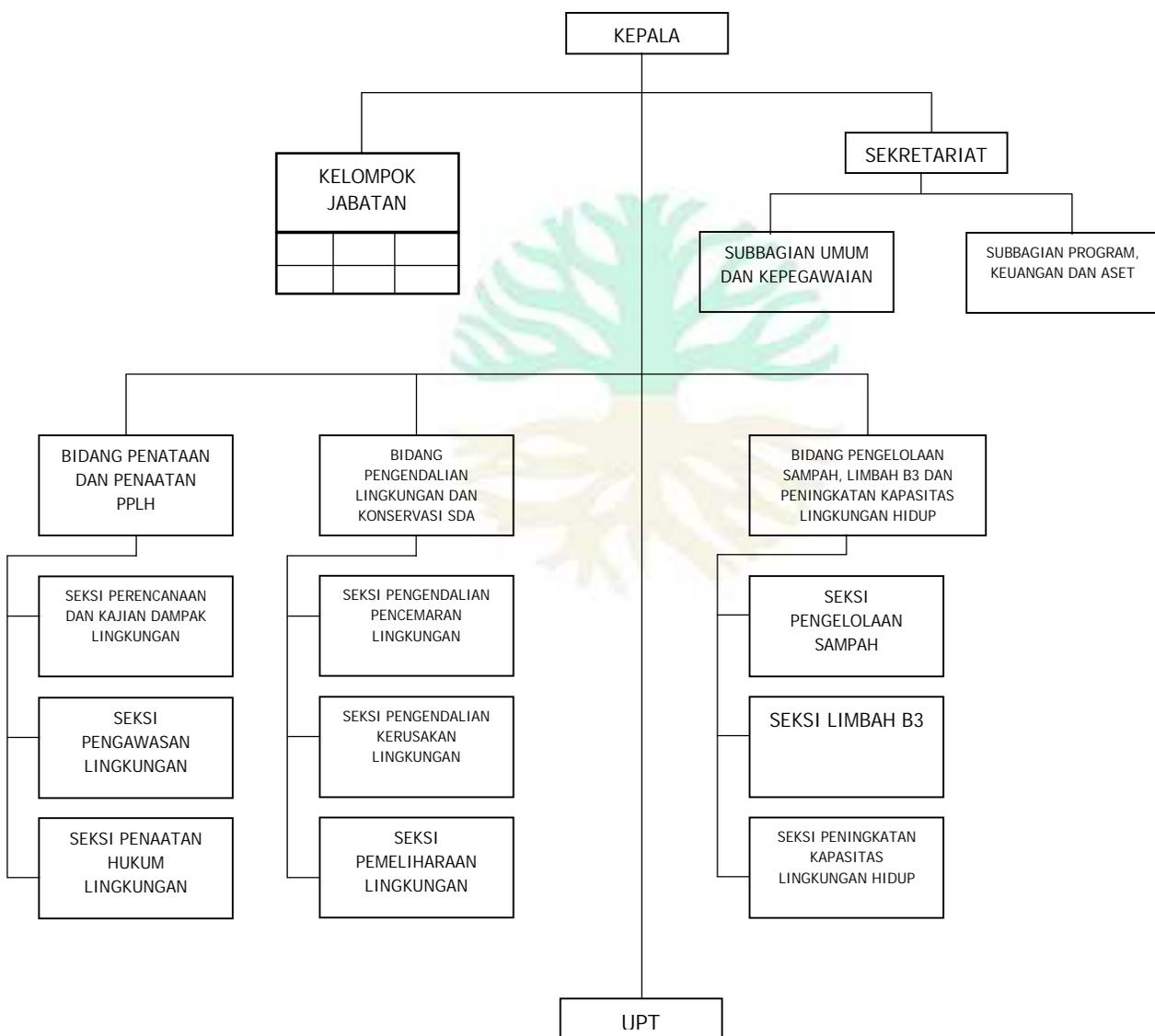
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, strukturnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Walikota dan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas dibantu oleh:

1. **Sekretariat** adalah unsur staf yang berada di bawah kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. Tugas sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi. Subbagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris serta diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, Sekretariat terdiri dari :
 - a. **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - b. **Subbagian Program, Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
2. **Bidang Penataan dan Petaan PPLH**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengawasan lingkungan, penataan hukum lingkungan. Bidang Penataan Dan Petaan PPLH terdiri dari:

- a. **Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Bidang Penataan dan Penuaan PPLH, melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, melaksanakan penyusunan dokumentasi RPPLH dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RPPLH, melaksanakan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), melaksanakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS, melaksanakan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Izin Lingkungan, audit Lingkungan Hidup dan analisis resiko lingkungan Hidup) wilayah kota, melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen (AMDAL dan UKL/UPL), dan melaksanakan pelayaman perizinan bidang lingkungan hidup kecuali perijinan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) wilayah kota.
- b. **Seksi Pengawasan Lingkungan**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Lingkungan, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengawasan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan

Lingkungan (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), melaksanakan evaluasi tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan.

- c. **Seksi Penataan Hukum Lingkungan**, menyusun rencana dan program kerja Seksi Penataan Hukum Lingkungan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penataan hukum lingkungan, melaksanakan penyusunan kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat biang lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; melaksanakan monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penerapan hukum lingkungan, melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
3. **Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber daya Alam**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan

pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber daya Alam terdiri dari:

- a. **Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian pencemaran lingkungan, melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan, melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi, melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar, melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan dan tidak lanjut hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, melaksanakan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- b. **Seksi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mengumpul dan mengolah bahan perumusab kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian kerusakan lingkungan, melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, melaksanakan pemantauan, penaggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, melaksanakan pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dana atau lahan berdasarkan analisa data, informasi dan konsep terkait, melaksanakan pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa, melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. **Seksi Pemeliharaan Lingkungan**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemeliharaan lingkungan, melaksanakan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK, melaksanakan perencanaan, penetapan, kebijakan, pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. **Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,**

mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas meliputi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :

- a. **Seksi Pengelolaan Sampah,** mempunyai tugas Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :mempunyai rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Sampah, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, pelaporan, petunjuk teknis pengelolaan sampah, melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah, melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah, melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah, melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, melaksanakan pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah, melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkut sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta dan badan usaha, melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan

akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta dan badan usaha wilayah kota, melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan.

- b. **Seksi Limbah B3**, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Limbah B3, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis Limbah B3, melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3, melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3, melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3, melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- c. **Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan**, menyusun rencana dan program kerja Seksi peningkatan Kapasitas Lingkungan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas lingkungan, melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA serta penetapan tanah Ulayat MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, melaksanakan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, melaksanakan koordinasi kota sehat/Adipura, melaksanakan peningkatan peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan LH.

5. **Unit Pelaksana Teknis** adalah Unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT sebagaimana dimaksud dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian

Pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang memiliki 81 personil yang dapat digambarkan berdasarkan pangkat/ golongan, jenis jabatan dan kualifikasi pendidikannya sebagaimana tercantum pada tabel berikut.



Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Libertus, M.Si 19620910 198402 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan	S.2
2	Sherly Maya Kartika,S.Hut, EnvMgmt 19730828 20003 2 004	Pembina /IV/a	Sekretaris Dinas	S.2
3	Drs. Nur Sahid, M.Si 19650513 199203 1 006	Pembina /IV/a	Kabid Penataan dan Penaatan PPLH	S.2
4	Ir. Fitriadi, M.Si 19670111 199703 1 001	Pembina IV/a	Kabid Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber	S2
5	Deddy Zahedi 19641231 199503 1 038	Penata Tk. I/III/d	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	D3
6	Supriani, ST, M.Si 19810823 200312 2 005	Penata Tk.I/ III/d	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	S.2
7	Dedi Afandi, ST, M.Si 19820418 200502 1 001	Penata Tk.I/ III/d	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	S.2
8	Tri Sandi Bayu Purnama 19690627 199503 1 001	Penata /III/c	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	D II
9	Ratih Eka Wanti,ST 19811030 200604 2 018	Penata /III/c	Kasi Pengawasan Lingkungan	S1
10	Surya Nengsih,S.Si, S.Sc 19841113 200803 2 003	Penata / III/c	Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	S.2
11	Wan Fardiyansyah, ST, M.Eng 19810821 200502 1 005	Penata /III/c	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	S.2
12	Meyta Puspitasari, ST 19840528 200803 2 001	Penata /III/c	Fungsional Umum	S.1
13	Fitriarsih 19731108 199403 2 003	Penata Muda Tk.I / III/b	Fungsional Umum	SMA
14	Agung Ananta Prabowo, SH 19820104 201001 1 013	Penata Muda Tk.I / III/b	Fungsional Umum	S.1
15	Risma Nidiya Sari,ST 19830616 201001 2 030	Penata Muda Tk.I / III/b	Fungsional Umum	S.1
16	Yossy Prima Virgianti, ST 19830906 201001 2 022	Penata Muda Tk.I / III/b	Fungsional Umum	S.1
17	Azrini, ST 19840309 201101 2 006	Penata Muda Tk.I /III/b	Fungsional Umum	S.1
19	M. Safaat, ST 19800402 201503 1 001	Penata Muda/ III/a	Fungsional Umum	S1
20	Restu Dewi Nurrahsari, S.T 19841013 201503 2 002	Penata Muda/ III/a	Fungsional Umum	S1
21	Ari Setiyani, A.Md 19820213 201001 2 015	Pengatur Tk. I/ IId	Fungsional Umum	D.III

1	2	3	4	5
22	Yuni Utami, A.Md 19830609 201101 2 008	Pengatur Tk. I / IId	Fungsional Umum	D.III
23	Najimi 19710123 200604 1 012	Pengatur/ II/c	Fungsional Umum	SMP
24	Yuliadi 19750711 200701 1 019	Pengatur/ II/c	Fungsional Umum	SLTA
25	Sabirin 19810210 200701 1 007	Pengatur/ II/c	Bend Penerimaan	SMK
26	Adi Wijaya 19601123 198603 1 011	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMP
27	Muarief 19700811 200701 1 025	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SLTA
28	Jumiat 19820122 200903 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Fungsional Umum	SLTA
29	Ashriana Yusnita 19850108 201001 2 006	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Fungsional Umum	SMA
30	Edy Santoso 19750306 200312 1 006	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Fungsional Umum	SLTA
32	Wahyudi 19680630 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Fungsional Umum	SLTA
33	Jamani 19710415 200604 1 018	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SLTP
34	Rajiman 19740105 52007011 028	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP
35	Dedy Purnomo 19770101200801 1 017	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP
36	Julius Fernandes Bilalu 19810712 200903 1 008	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SLTA
37	Suardi Teno 19661112 201212 1 002	Juru Muda Tk. I/Ib	Fungsional Umum	SMP
38	Sutrisno 19820501 2012 1 001	Juru Muda Tk. I/Ib	Fungsional Umum	SDN

UPT				
1	2	3	4	5
1	Rustam Effendi 196312281986031017	Penata Tk.I/ III/d	Kepala UPT	STM
2	Musinah, SH 197001101992122 002	Penata /III/c	Kasubbag Tata Usaha	Sarjana
3	Danan Widiarso, ST 19781010 1001 1 014	Penata Muda Tk.I/ III/b	staf	S1
4	Hermawan 19680315 200604 1 012	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SLTA
5	Walidi 196808062006041013	Pengatur/ II/c	Fungsional Umum	SMA
6	Rahmadi 197009092006041004	Pengatur/ II/c	Fungsional Umum	SMA
7	Kamaludin 197405072006041013	Pengatur/ II/c	Fungsional Umum	MA
8	Andi Budiman 198005172006041017	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMK
9	Apriyanto 197904112007011013	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMK
10	Subani 196606082007011032	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMA
11	Ferdaus 196901152007011028	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMA
12	Darni 198105222008011007	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMU
13	Teno Wahyudi 198207152009031004	Pengatur / II/c	Fungsional Umum	SMA
12	Afit Udin 198109112010011025	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Fungsional Umum	MA
13	Supardi 196606082006041008	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP
14	Japri 196904042006041012	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP
15	Jumadi 19750311 200801 1 011	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SLTA
16	Subeni 197307252006041011	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP
17	Edi Julianto 197407192007011010	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	PAKET C
18	Hendri.E 197409292007011012	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	PAKET C
19	U. Supardi 19690603 200701 1 043	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP
20	Hambali 197007242007011026	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SMP

1	2	3	4	5
21	Heriyadi 197712312008011023	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	PAKET C
22	Bastian 198105022008011011	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	PAKET C
23	Juma'ani 198106172009031005	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	PAKET C
23	Nasirin 198110252009031003	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	PAKET C
24	Hermansyah 19630208 198603 1 020	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SD
25	Nasri 198003302010011018	Juru Muda I / d	Fungsional Umum	PAKET B
26	Sanusi 196810052006041011	Juru / I/c	Fungsional Umum	SD
27	Iskandar. S 197804062007011019	Juru / I/c	Fungsional Umum	SD
28	M. Misrat 198509072007011003	Juru / I/c	Fungsional Umum	PAKET B
29	Akwardan 197508032007011018	Juru / I/c	Fungsional Umum	PAKET B
30	Saini 196312042007011010	Juru / I/c	Fungsional Umum	Paket A
31	Hendra 198605032007011001	Juru / I/c	Fungsional Umum	PAKET B
32	Ferry 197808052008011011	Juru / I/c	Fungsional Umum	PAKET B
32	Suherli 197809012008011005	Juru / I/c	Fungsional Umum	PAKET B
33	Bahtiar 198009162008011019	Juru / I/c	Fungsional Umum	PAKET B
34	Junardi 198102092008011006	Juru / I/c	Fungsional Umum	SD
35	Zapuri 19671005 200604 1 012	Juru / I/c	Fungsional Umum	SDN
36	Syaiful Anwar 196901052012121003	Juru Muda Tk. I/Ib	Fungsional Umum	SD
37	Chairun 196109112012121002	Juru Muda Tk. I/Ib	Fungsional Umum	SD
38	Agus Subardi 197308202012121002	Juru Muda Tk. I/Ib	Fungsional Umum	SD

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian,2018

**Tabel 2.2 Data Petugas Kebersihan di UPT-Kebersihan dan Pertamanan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang**

(Berdasarkan Tugas, Jabatan dan Status Pekerja Tahun 2018)

NO	JABATAN / PEKERJAAN	STATUS PEKERJA		JUMLAH
		PNS (orang)	NON PNS (orang)	
1	2	3	4	5
1	KEPALA UPT. KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1	-	1
2	KASUBBAG TATA USAHA UPT	1	-	1
3	PETUGAS ADMINISTRASI DI UPT	3	4	7
4	PENGAWAS KEBERSIHAN	4	-	4
5	MONTIR	1	2	3
6	SOPIR	4	15	19
7	PETUGAS ANGKUTAN	15	78	93
8	PETUGAS SAPU (GEROBAK RODA 2)	3	47	50
9	PETUGAS SAPU (KENDARAAN RODA 3)	3	8	11
10	PETUGAS TAMAN / MEDIAN JALAN	-	3	3
11	PEMELIHARA KEBERSIHAN KANTOR UPT	1	-	1
12	PETUGAS PENAGIH HARIAN		2	2
13	PENJAGA MALAM KANTOR UPT	1	-	1
14	PETUGAS TPA		6	6
JUMLAH		37	165	202

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian,2018

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam upaya mendukung kinerja personilnya antara lain: ruang kerja pegawai; aula pertemuan; perangkat komputer masing-masing bidang; akses internet; website Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang www.dislh.singkawangkota.go.id; mobil dinas; mobil operasional laboratorium lingkungan; motor operasional dinas; peralatan laboratorium lingkungan; gedung laboratorium lingkungan; perangkat dokumentasi kegiatan; perangkat presentasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLH dalam upaya mendukung kinerja personilnya antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLH

No	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
A.	Tanah	-	1,656,884,065.18	-	1,656,884,065.18
B.	Peralatan dan Mesin				
	- Alat Besar	-	7,094,540,000.00	-	7,094,540,000.00
	- Alat Angkutan	709,780,000.00	2,509,375,350.00	292,665,000.00	2,216,710,350.00
	- Alat Bengkel & Alat Ukur	4,239,400.00	47,555,400.00	316,000.00	47,239,400.00
	- Alat Pertanian/ - Peternakan	106,850,000.00	584,491,000.00	240,000.00	584,251,000.00
	- Alat Kantor & Rumah Tangga		1,367,876,764.00	142,139,800.00	1,225,736,964.00
	- Alat Studio & Komunikasi	690,049,575.00	116,957,000.00	5,025,000.00	111,932,000.00
	- Alat Kedokteran	81,540,000.00	5,535,000.00	-	5,535,000.00
	- Alat Laboratorium	-	3,072,942,200.00	177,850,000.00	2,895,092,200.00
	- Alat Keamanan				
C	Gedung dan Bangunan				
	- Bangunan Gedung	449,511,265.00	4,311,747,765.00	-	4,311,747,765.00
	- Bangunan Monumen	-	264,680,000.00	-	264,680,000.00
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	- Jalan dan Jembatan		-	-	-
	- Bangunan Air/Irigasi	-	4,850,400.00	-	4,850,400.00
	- Instalasi	797,634,700.00	1,481,791,608.00	-	1,481,791,608.00
	- Jaringan	48,847,000.00	55,473,000.00	41,554,700.00	13,918,300.00
E	Aset tetap lainnya				
	- Buku Perpustakaan	-	-	-	-
	- Barang bercorak kesenian/kebudayaan	4,480,000.00	82,595,000.00	-	82,595,000.00
	- Hewan ternak dan tumbuhan	-	-	-	-
	- Konstruksi dlm Pengerjaan	23,400,000.00	23,400,000.00	-	23,400,000.00
	Jumlah Aktiva Tetap				
	- Sistem Informasi	-	29,529,000.00	-	29,529,000.00
	- Aktiva lain-lain	-	350,914,000.00	-	350,914,000.00
	Jumlah Total	5,079,996,640.00	23,061,137,552.18	659,790,500.00	22,401,347,052.18

Sumber Data : Sub Bag Program Keuangan & Aset, 2018

Tabel 2.4 Kendaraan Roda 6, Roda 4, Roda 3 Dan Roda 2, Kendaraan Tak Bermotor Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018

No.	Jenis Kendaraan	Merk/ Type	Tahun Pengadaan	Banyaknya	Kondisi
1	Buldozer	CAT	2011	1	Baik
2	Wheel Excavator	CATERPILLAR D5K XL	2011	1	Baik
3	Dump Truck	-Isuzu / ELF NKR 771 HD	2009	1	Baik
4	Dump Truck	-	2012	1	Baik
5	Dump Truck	-ISUZU Dump Truk NKR 71 HD	2013	1	Baik
6	Dump Truck	-ISUZU	2013	1	Baik
7	Dump Truck	ISUZU NKR71 HD E2-2	2014	1	Baik
8	Dump Truck	ISUZU / NKR 71 HD	2015	1	Baik
9	Dump Truck	ISUZU / NKR 71 HD	2015	1	Baik
10	Dump Truck	TOYOTA DYNA 130 HT R6 TRUCK ARM ROLL CONTAINER	2016	1	Baik
11	Dump Truck	ISUZU NKR 71 HD VIN	2016	1	Baik
12	Dump Truck	ISUZU NKR 71 HD VIN	2016	1	Baik
13	Road Maintenance Truck	Road Barrier	2014	1	Baik
14	Road Maintenance Truck	Road Barrier	2014	1	Baik
15	Kendaraan Bermotor	Yamaha	2008	1	Baik
16	Mobil Operasional	ISUZU D MAX	2012	1	Baik
18	Mobil Dinas	Toyota Rush	2011	1	Baik
19	Motor Trail	Kawasaki	2015	1	Baik
20	Motor Trail	Kawasaki	2016	1	Baik
21	Motor Trail	Kawasaki	2016	1	Baik
22	Motor Operasional	Yamaha	2016	1	Baik
23	Motor Operasional	Yamaha	2016	1	Baik
24	Motor Operasional	Yamaha	2016	1	Baik
25	Truck + Attachhment	-ISUZU	2013	1	Baik
26	Pick Up	-Pick Up Daihatsu Grand Max	2012	1	Baik
27	Mobil	-	2007	1	Baik
28	Sepeda Motor	- JUPITER-MX	2008	1	Baik
29	Sepeda Motor	-Honda Supra X 125	2008	1	Baik
30	Sepeda Motor	-yaamaha vega ZR	2009	1	Baik
31	Sepeda Motor	-Yamah Jupiter CW	2009	1	Baik
32	Sepeda Motor	-Yamaha Vega - ZR DB	2012	1	Baik
33	Sepeda Motor	TOSA APP KTM	2015	1	Baik
34	Sepeda Motor	TOSA APP KTM	2015	1	Baik
35	Sepeda Motor	TOSA APP KTM	2015	1	Baik
36	Sepeda Motor	TOSA	2016	5	Baik
37	Gerobak Tarik		2014	20	Baik
38	Gerobak Dorong	Lokal	2015	7	Baik
39	Gerobak Dorong	-	2015	2	Baik
40	Gerobak Dorong	-	2016	24	Baik
41	Gerobak Dorong	-	2013	5	Baik
46	Gerobak Dorong	lokal	2014	2	Baik
47	Gerobak Dorong	GEROBAK DORONG	2016	4	Baik
48	Sepeda Motor	Yamaha Vega	2017	2	Baik

Sumber Data : Sub Bag Program Keuangan & Aset,2017

2.2.2 Pembiayaan

Pengelolaan belanja daerah yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang bersumber dari APBD (DAU) maupun APBN (DAK), direalisasikan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran yang diberikan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Singkawang. Rekapitulasi alokasi dana bidang Lingkungan Hidup TA. 2013 sampai dengan 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.5

Rekapitulasi alokasi belanja langsung bidang lingkungan hidup Kota Singkawang

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	DAU	DAK
2013	2,597,601,000	1,352,501,000	1,245,100,000
2014	3,304,156,800	1,384,486,800	1,919,670,000
2015	5,378,297,960	1,622,437,961	3,755,859,999
2016	2,604,880,460	2,023,358,460	581,522,000
2017	2,506,775,000	2,506,775,000	0
Total	16,391,711,220	8,889,559,221	7,502,151,999

Sumber Data : Sub Bag Program Keuangan & Aset, 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, selain melaksanakan tugas sesuai Tugas Pokok dan fungsinya juga melaksanakan kegiatan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kota Singkawang. Objek dari Retribusi Harian adalah para pedagang kakilima (Gerobak, pedagang hampan) Sedangkan objek Retribusi Bulanan dengan Klasifikasi Tarif yaitu; Tarif non Niaga (Rumah Tangga, Sekolah, dan Kantor/Instansi Pemerintah), Tarif Usaha Niaga (Kios/Warung, RumahToko/Ruko, Rumah Makan, mini market, Swalayan, Perhotelan, Perbankan, BUMN/D, Distributor/Gudang, Rumah Sakit), Serta tarif industri kecil, menengah dan Besar.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.1.100.000.000, dan pada penutupan akhir Tahun Anggaran 2017 realisasi pendapatan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.774.860.000.- (70,44%). Keseluruhan pendapatan ini berasal dari Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Persampahan) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 15 Juli 2011.

Pencapaian Realisasi Retribusi Pada Tahun 2017 belum mencapai target mengingat adanya penyesuaian/perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Persampahan) melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, sehingga masih bertahap untuk dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Untuk tahun mendatang akan terus dilaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat serta optimalisasi Petugas Pemungutan Retribusi agar target perolehan pendapatan dari sektor Retribusi Jasa Umum pelayanan Persampahan dapat tercapai.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang berperan aktif sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Singkawang. Pelayanan meliputi pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan dalam bentuk AMDAL, UKL UPL dan SPPL, penyelesaian kasus atau sengketa Lingkungan hidup yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang melalui sarana pos pengaduan serta pelayanan persampahan. Pelayanan lain untuk kepentingan umum misalnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lingkungan sekitar seperti sebaran titik api, kualitas udara dan lain-lain.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah berupaya dengan optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari persentase tingkat pencapaian target dan sasaran dan target kegiatan sebesar 100% untuk realisasi di tahun anggaran 2017. Namun demikian, masih terdapat pula beberapa target sasaran dan kegiatan yang belum memenuhi capaian target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya beberapa capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dapat dilihat pada Tabel 2. 1 berikut:

Tabel 2.6. Capaian kinerja DLH Kota Singkawang Sampai Tahun 2017

No.	Capaian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pembangunan tebing penahan longsor	-	-	1 unit	-	-
2	Perlindungan daerah konservasi tangkapan air	-	-	1 embung	-	-
		-	-	200 unit sumur resapan	80 unit sumur resapan	-
		-	3.900 batang	4300 batang bibit	10.000 batang	-
		-	-	-	15 unit penampung air	-
3	Penyediaan tempat pembuangan benda padat/cair pada tempat yang sesuai	-	-	1 unit IPAL UMKM	-	-
		-	-	1 unit IPAL Puskesmas	1 unit IPAL Puskesmas	-
4	Penyediaan plank himbauan	-	-	6 plank	-	-
		-	-	5 <i>standing banner</i>	-	-
5	Hasil pengukuran indeks kualitas air					
	Sungai Hangmoy	Tidak ada data	0.652	1.529	1.290	1.490
	Sungai Singkawang	- 90	2.750	1.173	1.348	4.401
	Sungai Semelagi	- 47	1.645	1.620	1.015	1.071
	Sungai Sedau	- 83	6.102	1.583	7.119	4.313
6	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	127.83	85
7	Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan lahan	Tidak ada data	Tidak ada data	49.34	Tidak ada data	Tidak ada data
	- tutupan hutan 29,28					
8	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	80%	85%	85%	90%	90%

No.	Capaian	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten / kota	3 pengaduan	1 pengaduan	4 pengaduan	10 pengaduan	4 pengaduan
10	Jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup :					
	a. Dokumen AMDAL	3	1	-	-	-
	b. Dokumen UKL-UPL	54	39	26	16	14
	c. SPPL	530	268	925	623	360
11	Timbulan sampah yang di tangani	70,080	70,642	71,021	71,178	71,996
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	96.5	95.87	94.5	94.16	93.91

Sumber Data : Bidang DLH, 2018

Dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup tahun 2012 – 2017 telah diraih beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional sebagai berikut :

1. Juara 1 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SDN 12 Singkawang Utara Tahun 2012;
2. Juara 2 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SMP N 4 Kota Singkawang Tahun 2012;
3. Juara 1 Kota Bersih dan Teduh TK Provinsi Tahun 2012
4. Juara 1 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SMP N 4 Kota Singkawang Tahun 2013;
5. Juara 2 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SDN 12 Singkawang Utara Tahun 2013
6. Sekolah adiwiyata TK Nasional SMPN 4 Kota Singkawang Tahun 2013,
7. Juara 3 Duta Lingkungan Hidup an. Yuni Lufiana Tahun 2013,
8. Juara 1 Kota Bersih dan Teduh TK Provinsi Tahun 2013,

9. Juara 1 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SDN 27 Singkawang Barat Tahun 2014
10. Juara 1 Kota Bersih dan Teduh TK Provinsi Tahun 2014,
11. Juara 1 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SDN 27 Singkawang Barat Tahun 2015
12. Sekolah adiwiyata TK Nasional SMPN 4 Kota Singkawang Tahun 2013
13. Juara 1 Kalpataru TK Provinsi an JUMADI Tahun 2015
14. Kelompok Surya Perdana Mandiri sebagai penyelamat lingkungan dalam pelestarian ekosistem pesisir tahun 2015,
15. Juara 1 Kota Bersih dan Teduh TK Provinsi Tahun 2015
16. Juara 1 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SMP N 4 Kota Singkawang Tahun 2015,
17. The best costum Duta Lingkungan Hidup Tk Provinsi an Nuri Dakasari Tahun 2015,
18. Juara 2 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SDN 3 Singkawang Barat Tahun 2016,
19. Juara 3 SEKOLAH ADIWIYATA TK PROVINSI SMPN 1 Kota Singkawang Tahun 2016,
20. Juara 1 Kota Bersih dan Teduh TK Provinsi Tahun 2016
21. Juara Harapan 1 Duta Lingkungan Hidup Tk Provinsi an.Rilo Riandra Tahun 2016,
22. Adiwiyata Nasional 2017 yaitu penghargaan untuk Sekolah Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan diraih oleh SD 23 Kota Singkawang

Penyelesaian 25 kasus / sengketa lingkungan hidup yang masuk melalui pos pengaduan dengan baik sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat perusakan atau pelanggaran dan pencemaran lingkungan hidup Kota Singkawang; yaitu penanganan kasus pencemaran air sejumlah 8 kasus, penanganan kasus pencemaran tanah sejumlah 5 kasus, penanganan kasus pencemaran udara sejumlah 11 kasus.

Usaha/kegiatan di Kota Singkawang yang telah memiliki Dokumen AMDAL sampai dengan tahun 2017 sebanyak 5 usaha/ kegiatan.

Tabel 2.7

Daftar usaha/kegiatan di Kota Singkawang yang telah memiliki Dokumen AMDAL sampai dengan tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Lokasi	Nomor Persetujuan/SK	Tanggal Persetujuan/Pengesahan
1	Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Luas ± 11.500 Ha, Kapasitas 60 TBS/Jam	PT. Patiware Perintis Makmur	Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang	412/BLHD/2012	20 Juli 2012
2	Pengembangan kawasan wisata terpadu Sinka Island Park	CV. Sinka Island Park	Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan	551/BLHD/2013	7 Desember 2013
3	Kegiatan pembibitan dan komersial ayam ras serta	PT. Satwa Borneo Jaya	kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Utara dan Singkawang Timur	105/BLHD/2013	28 Januari 2013
4	Kegiatan Industri pupuk dan industri daur ulang kardus	PT. Sinka Sinye Agrotama	Kecamatan Singkawang Selatan	139/BLHD/2013	08 Februari 2013
5	Kegiatan pembangunan Singkawang City Mall dan Hotel	PT. Putra Sinka Sukses	Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	100 Tahun 2014	4 Juli 2014

Sumber Data : Bidang Penataan Dan Penataan PPLH, 2017

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang setiap tahun dilakukan secara maksimal yang tergambar dalam persentase realisasi (dapat dilihat pada tabel 2.8).

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penanganan sampah	-	-	-	91	92	93	94	95	70	71	71	71	72	77	77	76	76	76
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	-	-	-	30	50	70	90	100	50	50	70	90	100	30	100	100	100	100
3	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	-	-	-	50	80	100	100	100	40	80	80	80	100	80	100	80	80	100
4	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	-	-	-	50	80	100	100	100	40	80	80	80	100	80	100	80	80	100
5	Persentase luasan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	-	-	-	50	80	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bidang DLH, 2018

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	(Rp)					(Rp)					(%)					Anggaran	Realisasi
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	585,533,000	563,815,500	482,195,660	440,326,660	5,682,408,800	541,036,719	535,330,844	420,482,189	482,713,850	5,369,770,627	0.92	0.95	0.87	1.10	0.94	1,019,375,160	965,746,782
Penyediaan jasa surat-menyurat	1500,000	1575,000	885,000	885,000	2,175,000	1411,500	1411,500	721,500	651,000	1842,000	0.94	0.90	0.82	0.74	0.85	135,000	86,100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55,200,000	62,400,000	85,200,000	85,200,000	173,522,350	44,770,019	51,953,152	58,078,883	59,089,638	73,556,504	0.81	0.83	0.68	0.69	0.42	23,664,470	5,757,297
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,000,000	2,800,000	5,700,000	5,700,000	35,425,000	4,131,600	1,882,300	4,242,500	4,268,600	21,720,100	0.69	0.67	0.74	0.75	0.61	5,885,000	3,517,700
Penyediaan jasa kebersihan kantor	9,710,500	10,780,000	2,893,000	4,193,000	4,244,500	9,710,500	10,780,000	2,891,000	4,193,000	4,235,600	100	100	100	100	100	(1,093,200)	(1,094,980)
Penyediaan alat tulis kantor	33,668,500	29,625,500	18,723,500	24,382,000	54,466,850	33,668,000	29,625,500	18,719,000	24,375,575	38,773,350	100	100	100	100	0.71	4,159,670	1,021,070
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,200,000	20,450,000	11,261,400	11,261,400	46,242,100	20,200,000	20,450,000	11,208,800	11,203,900	39,743,500	100	100	100	0.99	0.86	5,208,420	3,908,700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,106,000	28,895,000	27,378,000	19,790,000	37,780,000	4,106,000	28,782,000	2,373,000	19,250,000	33,898,000	100	100	0.09	0.97	0.90	6,734,800	5,958,400
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	64,280,000	50,350,000	36,925,000	14,856,500	126,735,000	57,703,000	46,755,000	36,730,000	34,707,500	88,045,408	0.90	0.93	0.99	2.34	0.69	12,491,000	6,068,482
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	3,600,000	3,840,000	3,840,000	1,800,000	1,800,000	2,660,000	2,400,000	1,730,000	1,620,000	1,590,000	0.74	0.63	0.45	0.90	0.88	(360,000)	(24,000)
Penyediaan makanan dan minuman	12,556,500	11,000,000	9,800,000	10,480,000	50,090,000	2,040,000	8,280,000	9,769,600	12,871,000	22,640,600	0.16	0.75	100	123	0.45	7,506,700	4,120,120
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	282,611,500	250,000,000	180,000,000	180,000,000	422,460,000	280,516,100	249,881,392	179,717,906	241,328,637	421,046,543	0.99	100	100	134	100	27,969,700	28,106,089
Penyediaan pelayanan administrasi keuangan	52,500,000	39,600,000	54,950,000	54,950,000	99,500,000	40,520,000	43,530,000	49,900,000	42,080,000	91,980,000	0.77	1.10	0.91	0.77	0.92	9,400,000	10,292,000
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	39,600,000	52,500,000	44,639,760	44,639,760	4,627,968,000	39,600,000	39,600,000	44,400,000	44,400,000	4,550,093,114	100	0.75	0.99	0.99	0.98	917,673,600	902,098,623
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	331,910,000	54,960,000	88,552,500	190,727,500	3,107,511,000	330,501,500	54,670,000	88,185,000	116,652,500	2,029,252,000	1.00	0.99	1.00	0.61	0.65	555,120,200	339,750,100
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	4,985,000	0	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0	0
Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	24,452,500	0	0	0	0	24,400,000	0	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0	0
Pengadaan tanah TPA dan LPT	0	0	0	68,322,500	2,100,000,000	0	0	0	0	189,398,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	420,000,000	237,879,720
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250,000,000	15,960,000	0	25,000,000	52,800,000	249,750,000	15,870,000	0	25,000,000	52,120,000	100	0.99	0.00	100	0.99	(39,440,000)	(39,526,000)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66,550,000	39,000,000	72,000,000	51,400,000	913,831,000	65,555,000	38,800,000	72,000,000	45,740,000	766,033,900	0.99	0.99	100	0.89	0.84	169,456,200	140,095,780
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,360,000	0	16,552,500	16,552,500	40,880,000	15,196,500	0	16,185,000	16,527,500	21,699,500	0.99	0.00	0.98	100	0.53	5,104,000	1,300,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	7,500,000	237,400,000	0	0	0	7,500,000	181,372,000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.76	47,480,000	36,274,400
Pengadaan pakaian kerja lapangan	0	0	0	0	197,400,000	0	0	0	0	143,372,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	39,480,000	28,274,400
Pengadaan pakaian khusus hari-hari kerja	0	0	0	7,500,000	40,000,000	0	0	0	7,500,000	40,000,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8,000,000	8,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	8,000,000	5,191,800	5,191,800	5,191,800	0	7,791,600	5,191,800	4,658,800	4,908,700	0.00	0.97	1.00	0.90	0.95	1,038,360	981,740
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	4,000,000	2,531,400	2,531,400	2,660,400	0	4,000,000	2,531,400	2,653,400	2,457,600	0.00	1.00	1.00	0.85	0.92	532,080	491,520
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0	4,000,000	2,660,400	2,660,400	2,531,400	0	3,791,600	2,660,400	2,505,400	2,451,100	0.00	0.95	1.00	0.94	0.97	506,280	490,220
Program Penguatan Transparansi Publik	4,600,000	4,600,000	5,000,000	7,000,000	17,000,000	3,000,000	4,600,000	5,000,000	7,000,000	16,255,000	0.65	1.00	1.00	1.00	0.96	2,480,000	2,651,000
Expo kinerja SKPD	4,600,000	4,600,000	5,000,000	7,000,000	17,000,000	3,000,000	4,600,000	5,000,000	7,000,000	16,255,000	0.65	1.00	1.00	1.00	0.96	2,480,000	2,651,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	0	0	0	1,887,156,000	0	0	0	0	1,652,909,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	377,431,200	330,581,990
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0	0	0	0	905,670,000	0	0	0	0	776,970,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	181,340,000	155,394,000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	0	0	0	0	30,630,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126,000	0
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di TPA-TPS	0	0	0	0	950,856,000	0	0	0	0	875,939,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	190,171,200	175,187,990
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	183,081,000	224,088,800	328,243,000	942,973,500	227,461,000	181,327,999	187,757,720	304,868,250	638,989,900	198,288,300	0.99	0.84	0.93	0.68	0.87	8,876,000	3,392,060
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	5,477,000	0	0	15,000,000	0	5,477,000	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1095,400)	(1095,400)
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	0	0	14,000,000	91,755,000	42,080,000	0	0	0	42,156,800	29,529,950	0.00	0.00	0.00	0.46	0.70	8,416,000	5,905,990
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	169,595,000	9,000,000	0	75,000,000	138,144,000	167,841,999	9,000,000	0	74,433,200	132,087,000	0.99	1.00	0.00	0.99	0.96	(6,290,200)	(7,151,000)
Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	0	14,174,000	24,199,000	13,027,000	7,395,000	0	10,909,500	18,199,000	3,027,000	3,824,850	0.00	0.77	0.75	0.23	0.52	1,479,000	764,970
Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	0	149,618,800	290,044,000	696,532,500	39,842,000	0	116,739,720	286,669,250	519,372,900	32,846,500	0.00	0.78	0.99	0.75	0.82	7,968,400	6,569,300
Pengembangan Perda/Perwako bidang lingkungan hidup atau pengembangan peraturan lingkungan	8,009,000	51,296,000	0	51,659,000	0	8,009,000	51,108,500	0	0	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	(160,180)	(160,180)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1,438,110,000	2,328,692,500	4,471,415,000	600,941,000	197,471,000	1,430,594,000	174,623,000	2,925,869,120	542,179,000	122,251,700	0.99	0.07	0.65	0.90	0.62	(248,127,800)	(261,668,460)
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	587,000,000	0	863,609,000	105,941,000	85,776,000	585,967,000	0	696,503,000	103,480,000	49,099,700	1.00	0.00	0.81	0.98	0.57	(100,244,800)	(107,373,460)
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	659,610,000	2,328,692,500	3,607,806,000	495,000,000	111,695,000	653,829,000	174,623,000	2,229,366,120	438,699,000	73,152,000	0.99	0.07	0.62	0.89	0.65	(109,583,000)	(116,135,400)
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	10,000,000	0	0	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000)	(198,000)
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan kawasan wisata	181,500,000	0	0	0	0	180,898,000	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(36,300,000)	(36,179,600)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	35,512,000	120,000,000	0	250,000,000	7,708,000	35,412,000	120,000,000	0	198,707,800	7,708,000	1.00	1.00	0.00	0.79	1.00	(5,560,800)	(5,540,800)
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	3,862,000	120,000,000	0	0	7,708,000	3,862,000	120,000,000	0	0	7,708,000	100	100	0.00	0.00	100	769,200	769,200
Pengembangan data dan informasi lingkungan (Penyusunan KLHS RPJM Walikota Terpilih dan KLHS RDTR)	31650,000	0	0	250,000,000	0	31550,000	0	0	198,707,800	0	100	0.00	0.00	0.79	0.00	(6,330,000)	(6,310,000)
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	18,855,000	0	480,000,000	192,815,500	0	17,472,600	0	478,107,000	154,645,500	0	0.93	0.00	1.00	0.80	0.00	(3,771,000)	(3,494,520)
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan	18,855,000	0	480,000,000	192,815,500	0	17,472,600	0	478,107,000	154,645,500	0	0.93	0.00	1.00	0.80	0.00	(3,771,000)	(3,494,520)
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup	0	0	57,700,000	47,700,000	20,932,000	0	0	57,670,000	47,480,000	14,668,750	0.00	0.00	1.00	1.00	0.70	4,186,400	2,933,750
Penyediaan informasi lingkungan	0	0	57,700,000	47,700,000	0	0	0	57,670,000	47,480,000	0	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0	0
Penyediaan Perijinan lingkungan	0	0	0	0	20,932,000	0	0	0	0	14,668,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	4,186,400	2,933,750

Sumber Data : Sub Bag Program Keuangan & Aset, 2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Singkawang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang merupakan instansi yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Untuk rencana pelaksanaan usaha/kegiatan yang wajib menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), pelayanan dilakukan melalui penerbitan surat rekomendasi kelayakan lingkungan. Pelayanan lainnya adalah fasilitasi pengaduan dari masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran lingkungan. Pengaduan yang masuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk dicari penyelesaiannya secara bersama-sama dan kekeluargaan. Selain itu juga diberikan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup melalui website Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yaitu www.dislh.singkawangkota.go.id.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, meliputi:

1. Permasalahan yang terjadi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana oleh Pemerintah;
2. Kepedulian masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang masih rendah sehingga perlu didukung oleh perilaku budaya ramah lingkungan;
3. Pihak swasta kurang berkontribusi dalam investasi infrastruktur bidang lingkungan hidup;
4. Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA;
5. Isu lingkungan hidup yang belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
6. System penegakan hukum termasuk kelembagaan yang perlu ditingkatkan;
7. Kebijakan sektor yang cenderung mengutamakan keuntungan (profit) dan tidak berwawasan lingkungan;
8. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, meliputi:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk Perda;
2. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain seperti akademisi, media dan masyarakat;
3. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;
4. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain;
5. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;
6. Perkembangan teknologi pengelolaan lingkungan yang semakin meningkat.



3.1 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang antara lain :

- a) Kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup

Sarana dan prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup di Kota Singkawang masih sangat terbatas. Selain itu pendekatan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan optimal. Sampai saat ini beberapa kawasan belum memiliki sarana dan prasarana fisik pengendali pencemaran lingkungan yang memadai, seperti sarana pengolahan sampah dan air limbah. Sementara beberapa sarana dan prasarana yang ada seperti tong sampah pemilah, sumur resapan, biopori, IPAL dan biogas belum dimanfaatkan secara maksimal akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sarana tersebut.

- b) Pembangunan ekonomi yang kurang memasukkan pertimbangan lingkungan

Secara teoritis permasalahan lingkungan akan meningkat seiring dengan peningkatan laju pembangunan, karena akan terjadi peningkatan eksploitasi sumberdaya alam dan dampak terhadap kerusakan lingkungan, dan sekaligus terjadi peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Perkembangan ekonomi dan bisnis mendorong tingginya permintaan terhadap lahan untuk pengembangan berbagai fasilitas bisnis, seperti ruko dan swalayan. Dalam kondisi ini, alih fungsi lahan tidak terhindarkan termasuk lahan pertanian yang subur, sehingga ruang terbuka hijau di daerah perkotaan semakin menyusut. Integrasi pertimbangan lingkungan dalam pembangunan ekonomi di Kota Singkawang masih sangat lemah sehingga menimbulkan berbagai bentuk eksternalitas negatif, yaitu inefisiensi yang timbul karena sebagian komponen biaya khususnya biaya lingkungan hidup di luar perhitungan dari pengambilan keputusan dalam suatu tindakan pembangunan ekonomi. Eksternalitas negatif di bidang lingkungan hidup ini pada akhirnya akan ditanggung oleh publik, seperti akibat menurunnya kualitas sanitasi lingkungan, pencemaran udara dan air yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

c) Lemahnya penegakan hukum

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih menghadapi kendala-kendala dalam mengimplementasikannya di lapangan. Sebagai contoh, lemahnya sistem hukum ini terlihat dari sulitnya pembuktian kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kapasitas aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya praktek-praktek penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Permasalahan ini menyebabkan berbagai kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup terakumulasi yang mengarah kepada krisis lingkungan.

d) Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang

Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan perumusan pemanfaatan/penggunaan ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya degradasi lingkungan adalah adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang ada, seperti pelanggaran kawasan berfungsi lindung (hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, dll), sebagai akibat lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

e) Lemahnya koordinasi pengelolaan lingkungan

Pengelolaan lingkungan sering kali dianggap sebagai sektor yang berdiri sendiri sehingga sektor-sektor lainnya memberi sentuhan yang sangat minim dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam setiap sektor pembangunan merupakan kendala dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan. Disisi lain, pengelolaan lingkungan hidup juga menghadapi kendala yang berangkat dari kurangnya keterpaduan dan koordinasi antarsektor dan antarpelaku, sehingga sumberdaya yang dialokasikan dalam pengelolaan lingkungan baik finansial, teknis maupun dukungan sumberdaya manusia belum berjalan secara sinergis dan cenderung berjalan sendiri-sendiri yang seringkali tumpang tindih.

f) Pencemaran kualitas udara :

1. Akibat dampak kabut asap

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah, kejadian ini dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, tidak hanya faktor alam yang berpengaruh, namun juga

karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, diantaranya menyebabkan kegundulan hutan dan lahan, banjir bandang yang disebabkan hutan gundul karena kurangnya resapan air apabila terjadinya hujan. Namun yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah asap yang timbul dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya mempengaruhi jarak pandang dan menimbulkan penyakit ISPA. Bencana kemarau terjadi karena musim Kemarau yang berkepanjangan, disertai tiupan angin yang cukup tinggi sehingga menyebabkan lahan gambut kering dan rentan terbakar.

2. Akibat gas buangan kendaraan bermotor dan industri

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan industri yang semakin meningkat dengan berbagai merk dan tipe akan meningkatkan konsumsi pemakaian bahan bakar minyak dan menimbulkan efek pencemaran udara. Melihat permasalahan tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan industri kendaraan bermotor serta masyarakat untuk menyadari sedini mungkin efek bahaya yang ditimbulkan oleh polutan emisi gas buang dan secara bersama-sama mengupayakan suatu tindakan bagaimana agar udara yang terhirup bisa berkurang dari pencemaran yang diakibatkan oleh polutan emisi gas buang serta ramah lingkungan.

g) Pencemaran air

Air merupakan sumber daya yang amat vital untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan air dirasakan semakin meningkat dan saat ini penyediaan air bersih bagi warga Singkawang menghadapi berbagai kendala. Sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai bidang maka baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan termasuk di dalamnya pencemaran sungai yang berasal dari limbah domestik maupun non domestik seperti pabrik dan industri. Oleh karena itu, pencemaran air sungai dan lingkungan sekitarnya perlu dikendalikan seiring dengan laju pembangunan agar fungsi sungai dapat dipertahankan kelestariannya. Pemantauan kualitas air dilakukan di beberapa titik, meliputi Sungai Semelagi, Sungai Singkawang, Sungai Sedau, dan Hangmoy, dan beberapa parameter fisika, kimia, dan biologi diukur dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas terakhir pada Bulan Oktober 2017, diketahui bahwa keempat sungai tersebut mengalami **cemar ringan** (dibandingkan dengan baku mutu air kelas II). Permasalahan pencemaran air sungai disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk kedalam sungai yang berasal dari berbagai sumber pencemaran yaitu dari limbah industri, domestik, rumah sakit, peternakan, pertanian dan sebagainya. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, diperlukan Pemantauan dan Evaluasi kualitas air sungai di Kota Singkawang. Dengan pencemaran air akan merusak ekosistem sungai. Kebanyakan pencemaran dari pembuangan Industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.

h) Pencemaran lahan dan hutan

Berdasarkan analisis data (2016) yang mengacu pada Dokumen Standar dan Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 76/2008 menunjukkan bahwa, pada kawasan di luar hutan di Kecamatan Singkawang Selatan merupakan Kecamatan dengan tingkat kekritisian lahan paling luas yang disebabkan oleh erosi yaitu seluas 19967,8 Ha, sedangkan di kawasan dalam hutan kecamatan Singkawang Timur merupakan daerah dengan tingkat kekritisian paling luas yaitu 3021,4 Ha. Aktivitas pertanian yang masiv di Kecamatan Singkawang Selatan merupakan salah satu pemicu besarnya erosi dan kekritisian lahan, hal ini terutama terjadi pada lahan-lahan dengan topografi >3%. Faktor-faktor yang menyebabkan kawasan hutan di Singkawang Selatan memiliki luas kekritisian paling besar dikarenakan pertambangan galian C yang banyak merambah kawasan hutan di pegunungan.

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan, ladang berpindah, penebangan liar, perambahan hutan dan lain-lainnya. Pada tahun 2014 kerusakan hutan di Kota Singkawang seluas 411 Ha yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, sedangkan pada tahun 2016 berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2016), kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang seluas 133,5 Ha. Salah satu penyebab kebakaran lahan adalah ladang berpindah, dimana berdasarkan analisis spasial, luas ladang berpindah di Kota Singkawang seluas 5,6 Ha.

i) Kawasan Pantai, Laut dan Pesisir

Maraknya aktivitas pemanfaatan di wilayah pesisir Singkawang maupun di hulu dan laut lepas, menyebabkan wilayah ini tengah mengalami situasi yang tak menguntungkan dan memprihatinkan. Kawasan tersebut berada dalam tekanan yang besar dimana ekosistemnya menghadapi ancaman kerusakan dan penurunan kualitas yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kelangsungan fungsional ekosistem pesisir Singkawang.

Ancaman-ancaman ini dapat berdiri sendiri atau saling berkaitan dalam setiap pemanfaatan sumberdaya atau kegiatan pembangunan yang memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir Singkawang. Beberapa ancaman potensial terhadap ekosistem pesisir wilayah Singkawang antara lain:

1) Sedimentasi dan pencemaran

Kegiatan pembukaan lahan atas (hulu) dan pesisir untuk pertanian, pertambakan, permukiman, industri dan pengembangan kota merupakan sumber beban sedimen dan pencemaran perairan pesisir. Adanya penebangan hutan dan pembukaan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menimbulkan sedimen yang serius di beberapa daerah muara dan perairan pesisir Singkawang. Selain itu sampah padat yang berasal dari rumah tangga dan kota merupakan sumber pencemar perairan pesisir yang sulit dikontrol, akibat perkembangan pembangunan yang pesat. Demikian pula pembukaan lahan pesisir untuk pertambangan ilegal galian C dan pariwisata berkontribusi penting dalam peningkatan pencemaran baik organik maupun anorganik di perairan Singkawang.

2) Erosi pantai

Erosi pantai merupakan salah satu masalah serius yang menyebabkan degradasi garis pantai. Selain dari proses-proses alami seperti angin, arus dan gelombang, aktivitas manusia juga menjadi penyebab penting erosi pantai. Erosi pantai yang diakibatkan oleh aktivitas manusia antara lain pembukaan hutan pesisir untuk tambak dan pembangunan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat abrasi pada kawasan persisir terjadi terutama pada bagian selatan dan utara. Pergeseran garis pantai berkisar antara 50 – 500m. Adanya upaya swadaya dari masyarakat untuk melakukan penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi terutama di wilayah utara menunjukkan hasil yang baik, dimana abrasi

terhenti dan telah terjadi perubahan posisi garis pantai yang lebih maju kearah laut sekitar 40-50 m.

3) Degradasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan permukiman serta perkotaan kearah pesisir, maka terlihat jelas adanya degradasi sumberdaya alam pesisir. Salah satu degradasi sumberdaya alam pesisir Singkawang yang cukup menonjol adalah degradasi hutan mangrove sebagai akibat pembukaan lahan/konversi hutan atau reklamasi pantai menjadi kawasan pemukiman, pertambakan dan industri. Ancaman lain terhadap keanekaragaman hayati di perairan pesisir Singkawang diduga antara lain berasal dari pembangunan infrastruktur seperti bangunan obyek wisata di pinggir pantai. Timbulan sampah yang dihasilkan dari objek wisata di sekitar pantai sangat banyak, selain itu sampah-sampah yang terbawa aliran sungai dan dibuang masyarakat langsung ke laut sangat mengotori dan mencemari terbawa pada bagian bagian tertentu yang semestinya ditumbuhi mangrove.

j) Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah. Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, tingkat kompleksitas masalah penanganan sampah ini tidak terlepas dari implikasi masalah-masalah berikut :

1. Pesatnya pertambahan penduduk di kota, sehingga berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan;
2. Keterbatasan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik termasuk dalam pengelolaan sampah;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya partisipasi dalam membayar retribusi layanan kebersihan; dan
4. Sarana dan prasarana yang minim di tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan.

Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah).

Beberapa kegiatan/industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Singkawang antara lain kegiatan bengkel dan kegiatan yang dilakukan oleh PLN. Saat ini masih dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pengawasan limbah B3 sehingga ijin penyimpanan sementara limbah B3 dan rekomendasi serta ijin pengangkutan limbah B3 masih belum diterbitkan. Salah satu upaya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan, memonitor sekaligus mendata timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan/industri. Namun kegiatan ini masih terkendala dengan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang ada dan masih kurangnya kesadaran sebagian besar kegiatan/industri yang berpotensi sebagai penghasil limbah B3 untuk mengelola limbahnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih Tahun 2018 – 2022 adalah "Singkawang HEBAT 2022".

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
- b. Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
- c. Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
- d. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan kota singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata;

Uraian nilai strategis dari Visi dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi Dengan Nilai Strategis

VISI SINGKAWANG HEBAT 2022	
NILAI STRATEGIS	URAIAN NILAI STRATEGIS
1. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;	Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang harmonis dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.
2. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri	Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
3. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;	Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
4. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;	Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat

	<p>dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.</p>
<p>5. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata</p>	<p>Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata. Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang terdepan dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan bagi daerah di sekitarnya (hinterland). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.</p>

Misi dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan

misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipt kelestarian alam dan lingkungan.

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek

kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017-2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terutama di :

Misi ketiga : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.

Untuk mencapai target Misi 3, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut:

Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan rumusan sasaran : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan Kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2013 (Pada saat perumusan Renstra ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat belum tersedia) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya perumahan layak huni/ berkualitas dan Kawasan permukiman sehat.
- b. Terwujudnya penurunan beban pencemaran dan laju kerusakan lingkungan.
- c. Terwujudnya efektifitas pelayanan publik di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Langkah selanjutnya yang dipandang perlu dalam menentukan program dan kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui kebijakan dan strategi. Ada beberapa strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu :

- a) Mendorong ketersediaan perumahan yang layak huni dan kawasan permukiman yang sehat.
- b) Mengendalikan perubahan iklim, beban pencemaran dan laju kerusakan lingkungan melalui pendataan, pembinaan, pengawasan, penataan lingkungan, kemitraan dan penegakan hukum lingkungan.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas SDM bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

3.4 Telaah Rencana tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

- a. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;
- b. pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- g. perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;

- h. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- j. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- k. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan; dan
- l. penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.

Strategi untuk pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman meliputi:

- a. menjaga berfungsinya secara optimal pusat pelayanan yang sudah ada;
- b. mendorong berfungsinya pusat pelayanan kegiatan yang baru;
- c. meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat pelayanan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- d. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.

Strategi untuk pewujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung;
- b. melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mengalokasikan peruntukan RTH kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dengan RTH publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan

- e. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu dari permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan serta hasil telaahan terhadap visi, misi, program pembangunan, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup di Kota Singkawang memuat isu – isu seperti pencemaran sungai, degradasi hutan dan lahan, pertambangan, pengelolaan sampah pola 3 R, pengelolaan limbah, pengolahan limbah B3,

peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Pencemaran sungai

Limbah yang dihasilkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan teknologi ramah lingkungan pengolahan limbah. Disamping itu, terbatasnya tenaga pengawas lapangan oleh pemerintah daerah. Resiko yang terjadi yaitu limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dalam skala kumulatif akan menurunkan daya tampung lingkungan, baik lahan maupun badan air.

2. Degradasi lahan,

Degradasi lahan mengakibatkan lahan menjadi kritis, sehingga lahan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Artinya, manfaat dari produktivitas suatu lahan tidak sebanding dengan hasil produksinya. Salah satu penyebab utama lahan kritis umumnya oleh erosi tanah yang dipercepat akibat aktivitas manusia. Erosi tanah ini mengakibatkan menurunnya kualitas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, berkurangnya hasil tanaman, serta hilangnya unsur-unsur hara tanah. Pembukaan lahan tidak terkendali akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pertanian dan permukiman. Disamping itu, penambangan galian C seperti pasir dan batu di Kecamatan Singkawang Selatan mengakibatkan lahan kritis.

3. Pertambangan,

Aktivitas pertambangan di Kota Singkawang saat ini berlangsung dengan izin-izin yang tidak formal (tidak izin dengan Dinas Pertambangan) atau bahkan tanpa izin. Resiko pertambangan meliputi : peningkatan lahan kritis, pencemaran badan air dengan limbah B3, khususnya penambangan emas. Menurunnya kualitas air baku untuk minum penduduk Kota Singkawang, meningkatnya biaya rehabilitasi lahan dan badan air akibat pencemaran

4. Pengelolaan sampah pola 3 R

Masalah sampah saat ini termasuk hal penting, apalagi yang berkaitan dengan kota. Untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik lalu menjadikan sebagai pupuk, tas, dan lain-lain. Sampah merupakan sisa benda atau barang manusia yang telah digunakan dan merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah sampah, fakta menunjukkan bahwa potensi sampah terus meningkat seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan sampah organik yang mudah terurai dan sampah anorganik. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Permasalahan sampah dikuatirkan akan menimbulkan fenomena gunung es.

5. Pengelolaan limbah, pengolahan limbah B3,

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan limbah B3 di Kota Singkawang merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa hal pokok yang melatar belakangi dilakukannya pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan yaitu:

1. meningkatnya penggunaan B3 pada kegiatan industri, pertambangan, kesehatan, dan rumah tangga;
2. adanya kebutuhan industri penghasil limbah B3 terhadap ketersediaan fasilitas pengolahan, penyimpanan sementara dan penimbunan limbah B3 yang berwawasan lingkungan;
3. meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara yang akan menghasilkan lumpur dan abu yang berbahaya dan beracun;
4. limbah B3 yang dihasilkan biasanya mempunyai nilai ekonomis sehingga banyak orang yang ingin memanfaatkannya;
5. bersifat tahan lama (*persistant*) dan dengan waktu yang panjang (*long-term*) tinggal di lingkungan.
6. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan penghijauan merupakan kegiatan pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Bentuk kegiatan penghijauan yang dilakukan adalah pembangunan hutan kota, dan penghijauan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan di Kota Singkawang, kegiatan penghijauan dilakukan di tiap kecamatan. Fungsi penghijauan ditekankan sebagai penyerap CO₂, penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu dan belerang), peredam kebisingan, penahan angin dan peningkatan keindahan.



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menyusun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkup kebijakan pengelolaan lingkungan di Kota Singkawang. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

4.1 Tujuan

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sesuai dengan misi 6 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.

4.2 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut didukung melalui pencapaian sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja Tujuan /Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 \text{rata-rata} + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 \text{maksimum}}{2}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>0 ≤ Pij ≤ 1,0 baik (memenuhi baku mutu) 1,0 < Pij ≤ 5,0 cemaran ringan 5,0 < Pij ≤ 10,0 cemaran sedang Pij > 10,0 cemaran berat</p> </div>	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.301), HangMoi (1.390), Semelagi (0.971), Sedau (4.213)	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.301), HangMoi (1.390), Semelagi (0.971), Sedau (4.213)	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.201), HangMoi (1.290), Semelagi (0.871), Sedau (4.113)	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.101), HangMoi (1.190), Semelagi (0.771), Sedau (4.013)	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.001), HangMoi (1.090), Semelagi (0.671), Sedau (3.913)	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (3.901), HangMoi (0.990), Semelagi (0.571), Sedau (3.813)	Status Mutu Cemaran Ringan di 4 sungai : Singkawang (3.901), HangMoi (0.990), Semelagi (0.571), Sedau (3.813)
			Indeks Kualitas Udara Hasil	IKU = 100-[50/0,9 ×(Ieu - 0,1)]	85,2	85.2	85.4	85.6	85.8	86	86

			Pengukuran Indeks Kualitas tutupan Lahan $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{\quad}{\quad})$ Dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	49,35	49,35	49,36	49,37	49,38	49,39	49,39
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota $\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kota}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Kualitas Lingkungan $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ dimana : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan IPA = Indeks pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	69,34	69,34	69,44	69,54	69,64	69,74	69,74

			Timbulan Sampah Yang ditangani	Volume timbulan sampah yang ditangani _____ X 100	30	30	30	32	34	36	36
				Total timbulan sampah							
			Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota	Pengaduan Masyarakat yang ditangani _____ X 100	100	100	100	100	100	100	100
				Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi							

Tujuan dan sasaran dicapai dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD dapat dilihat pada table 5.1.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI 3 : MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM, DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STARATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	- Memperkuat regulasi dan upaya penegakan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam.	- Penyediaan Informasi Lingkungan dan perizinan lingkungan.
			- .Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)
			- Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
		- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi pemanfaatan sumberdaya yang berorientasi kelestarian lingkungan.	- Penyusunan dokumen kajian lingkungan..
			- Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup.
		- Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan potensi kerusakan lingkungan	- Peningkatan pemahaman dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
			- Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			- Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
			- Pemantauan kualitas lingkungan
			- Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
			- Koordinasi penertiban kegiatan pengrusakan lingkungan
			- Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Laboratorium
		- Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	- Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan
- Kerjasama Pengelolaan Persampahan			
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.			
			- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS-TPA.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup																		
Sasaran : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup																		
2.5.1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1.357.738.000	100	1.378.280.000	100	1.399.160.000	100	1.420.380.000	100	1.441.950.000	100	6.997.508.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.550.000	100	3.750.000	100	3.750.000	100	18.315.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	100	181.200.000	100	181.200.000	100	188.000.000	100	189.000.000	100	190.000.000	100	1.106.244.120	DLH	Singkawang
2.5.1.1.6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100	100	65.045.000	100	65.045.000	100	65.272.500	100	66.500.000	100	67.500.000	100	397.106.230	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100	100	86.850.000	100	86.850.000	100	90.000.000	100	93.500.000	100	94.500.000	100	552.206.295	DLH	Singkawang
2.5.1.1.8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan	100	100	9.573.000	100	15.000.000	100	15.800.000	100	17.800.000	100	17.900.000	100	58.444.122	DLH	Singkawang
2.5.1.1.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100	100	105.925.050	100	50.000.000	100	62.500.000	100	66.480.000	100	66.520.000	100	646.685.465	DLH	Singkawang
2.5.1.1.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	100	63.307.500	100	43.300.000	100	45.300.000	100	46.800.000	100	49.530.000	100	386.498.618	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.1.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	100	7.838.760	100	8.835.000	100	9.550.000	100	10.250.000	100	10.350.000	100	47.856.414	DLH	Singkawang
2.5.1.1.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	100	56.112.500	100	156.112.500	100	145.000.000	100	147.250.000	100	158.250.000	100	308.383.864	DLH	Singkawang
2.5.1.1.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.250.000	100	3.450.000	100	3.550.000	100	18.315.300	DLH	Singkawang
2.5.1.1.17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	100	100	48.537.500	100	38.588.810	100	38.588.810	100	40.000.000	100	41.500.000	100	283.352.954	DLH	Singkawang
2.5.1.1.18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100	100	332.060.690	100	332.060.690	100	337.060.690	100	339.500.000	100	340.500.000	100	2.113.620.358	DLH	Singkawang
2.5.1.1.20		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	100	100	395.288.000	100	395.288.000	100	395.288.000	100	396.100.000	100	398.100.000	100	1.975.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur (%)	100	100	1.224.800.000	100	1.227.500.000	100	1.237.040.000	100	1.256.660.000	100	1.256.619.300	100	6.202.619.300	DLH	Singkawang
2.5.1.2.22		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang dipelihara	100	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	100	15.000.000	100	61.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100	100	1.183.300.000	100	1.184.000.000	100	1.191.793.000	100	1.194.972.300	100	1.195.972.300	100	5.950.037.600	DLH	Singkawang
2.5.1.2.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	100	31.500.000	100	32.500.000	100	33.247.000	100	48.687.700	100	45.647.000	100	191.581.700	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	100	308.450.000	100	262.170.000	100	317.250.000	100	270.090.000	100	326.310.000	100	1.484.270.000	DLH	Singkawang
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	80	28.000.000	80	0	80	35.000.000	80	0	80	40.000.000	80	103.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.19		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	210	219	230.450.000	219	212.170.000	219	225.000.000	219	220.090.000	219	223.310.000	100	1.111.020.000	DLH	Singkawang
2.5.1.20		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	210	219	50.000.000	219	50.000.000	219	57.250.000	219	50.000.000	219	63.000.000	100	270.250.000	DLH	Singkawang
2.5.1.21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	12.244.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	54.244.000	DLH	Singkawang
2.5.1.22		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4.076.500	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	5.500.000	20	25.076.500	DLH	Singkawang
2.5.1.23		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	4.076.500	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	5	25.076.500	DLH	Singkawang
2.5.1.24		Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra Perangkat Daerah	1	1	4.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.091.000	DLH	Singkawang
2.5.1.25	Program Penguatan Transparansi Publik		Persentase transparansi publik	100	100	28.125.000	100	20.100.000	100	20.200.000	100	20.500.000	100	25.000.000	100	113.925.000	DLH	Singkawang
2.5.1.26		Expo Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan expo kinerja Perangkat Daerah	1	100	28.125.000	1	20.100.000	1	20.200.000	1	20.500.000	1	25.000.000	5	113.925.000	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.27	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi		Persentase penilaian bobot jabatan dalam penetapan standar gaji PNS	100	100	10.011.000	100	7.000.000	100	7.250.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	39.261.000	DLH	Singkawang
2.5.1.28		Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Dokumen evaluasi jabatan	1	1	10.011.000	1	4.000.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	5	26.761.000	DLH	Singkawang
2.5.1.29		Penyusunan Analisis Kompetensi Jabatan	Dokumen analisis kompetensi jabatan	0	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.250.000	1	3.250.000	4	12.500.000	DLH	Singkawang
2.5.1.15.00	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Persentase Timbulan sampah yang di tangani	93,91	30	6.918.767.000	30	6.849.580.000	32	8.539.260.000	34	9.978.990.000	36	10.490.500.000	36	42.777.097.000	DLH	Singkawang
2.5.1.15.01		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Tersusunnya dokumen pedoman umum kebijakan manajemen pengelolaan sampah	0	0	0	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	75.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.15.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Singkawang	0	0	0	3	356.000.000	27	645.000.000	27	740.000.000	5	730.000.000	62	2.471.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.15.04		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan PraSarana dan sarana Persampahan	Cakupan pelayanan pengangkutan sampah (rasio jumlah yang terangkut perhari di bagi jumlah timbulan sampah perhari)	29,99	30	856.782.150	30	431.880.000	32	1.038.404.000	34	994.404.000	36	1.055.404.000	36	4.376.874.150	DLH	Singkawang
2.5.1.15.08		Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	0	0	0	100	6.175.000	100	6.500.000	100	7.000.000	100	7.250.000	100	26.925.000	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.15.10		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang berkomitmen dalam menerapkan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	0	1	35000000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	47.793.650	4	172.793.650	DLH	Singkawang
2.5.1.15.11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan 3R	-	0	0	100	30.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	83.000.000	400	223.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.15.14		Penyediaan Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan	Optimalisasi pengembangan kinerja pengelolaan sampah	12	12	6.026.984.850	12	5.970.525.000	12	6.754.356.000	12	8.127.586.000	12	8.552.052.350	60	35.431.504.200	DLH	Singkawang
2.5.1.28.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan pelayanan publik bidang Lingkungan Hidup	90	90	26.605.000	90	106.780.000	95	72.120.000	95	82.460.000	95	82.810.000	95	370.775.000	DLH	Singkawang
2.5.1.28.01		Penyediaan Informasi Lingkungan	Penyediaan Informasi Pengelolaan Lingkungan	0	11	10.000.000	1	50.000.000	1	14.120.000	1	16.460.000	1	16.500.000	15	107.080.000	DLH	Singkawang
2.5.1.28.02		Penyediaan Perijinan Lingkungan	Jumlah izin bidang lingkungan yang dikeluarkan	100	100	16.605.000	100	17.605.000	100	18.000.000	100	19.500.000	100	19.560.000	100	91.270.000	DLH	Singkawang
2.5.1.28.xx		Penyusunan pelaporan mitigasi dan GRK	Tersedianya laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	110.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.28.xx		Penyediaan data dan informasi penanganan sampah	Penyediaan Informasi Pengelolaan Lingkungan	-	0	-	5	14.175.000	5	15.000.000	5	16.500.000	5	16.750.000	20	62.425.000	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.19.00	Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan ketersediaan informasi SDA dan LH (%)	N.A	90	250000000	91	606.000.000	92	294.900.000	93	316.640.000	94	341.630.000	94	1.809.170.000	DLH	Singkawang
2.5.1.19.01		Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Persentase sekolah yang telah menerapkan konsep berwawasan Lingkungan Hidup	0	0	0	100	106000000	100	57.000.000	100	316640000	100	341630000	100	821.270.000	DLH	Singkawang
2.5.1.19.06		Penyusunan KLHS RPJM Walikota Terpilih dan KLHS RDTR	Tersedianya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	0	1	250.000.000	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	2	750.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.19.xx		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tersedianya RPPLH Kabupaten / kota	0	0	0	0	0	1	237.900.000	0	0	0	0	1	237.900.000	DLH	Singkawang
2.5.1.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Persentase pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup > 3 yang ditangani (Air), Persentase pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup > 3 yang ditangani (Udara)	gan / san /	gan / san /	131.428.000	n /	350.200.000	an /	561.130.000	an /	753.490.000	an /	708.470.000	an /	2.504.718.000	DLH	Singkawang
2.5.1.16.xx		Pengembangan Perda/Perwako Bidang LH atau Pengembangan Peraturan Lingkungan	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bidang Lingkungan Hidup	0	4	11.699.500	2	12.000.000	1	13.000.000	3	15.000.000	2	18.000.000	12	176.699.500	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.16.04		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	100	100	20.664.000	100	27.000.000	100	35.000.000	100	38.500.000	100	48.000.000	100	176.664.000	DLH	Singkawang
2.5.1.16.17		Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah,kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota	100	100	11.470.400	100	17.000.000	100	23.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	96.792.300	DLH	Singkawang
2.5.1.16.xx		Pengukuran Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.401), HangMoi (1.490),Semelagi (5.213)	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.301), HangMoi (1.390),Semelagi	11.415.250	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.201), HangMoi (1.290)	13.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.101), HangMoi (1.190),Semelagi	14.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (4.001), HangMoi (1.090),Semelagi (0.671)	15.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (3.901), HangMoi (0.990),Semelagi	16.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai : Singkawang (3.901), HangMoi (0.990),Semelagi (0.571)	97.415.250	DLH	Singkawang
2.5.1.16.xx		Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	85	85,2	5.500.000	85,4	9.000.000	85,6	14.000.000	85,8	15.000.000	86	18.000.000	86	61.500.000	DLH	Singkawang
2.5.1.16.xx		Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan lahan	49,34	49,35	25582950	49,36	34.000.000	49,37	45.000.000	49,38	50.000.000	49,39	60.000.000	49,39	214.582.950	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.16.xx		Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Laboratorium	Jumlah parameter yang mampu diukur	0	0	0	10	150.000.000	1	300.000.000	1	449.413.650	1	393.293.650	13	1.292.707.300	DLH	Singkawang
2.5.1.16.14		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM), RT/RW, LSM	0	1	9.617.400	1	16.000.000	2	20.000.000	3	34.000.000	4	40.000.000	11	119.617.400	DLH	Singkawang
2.5.1.16.21		Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta/institusi yang memahami pengelolaan limbah B3	0	40	31.229.350	60	33.200.000	0	34.630.000	100	35.076.350	100	30.076.350	300	164.212.050	DLH	Singkawang
2.5.1.16.06		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pelayanan admistrasi perizinan pengumpulan Limbah B3 Skala Kota yang ditandatangani Walikota	-	1	4.249.150	2	5.000.000	2	7.500.000	2	8.500.000	2	9.500.000	9	34.749.150	DLH	Singkawang
2.5.1.16.01		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Masyarakat dan SKPD Kota Singkawang	0	0	0	≥60	34.000.000	≥62	55.000.000	≥64	68.000.000	≥66	45.600.000	≥66	202.600.000	DLH	Singkawang
2.5.1.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Cakupan kawasan SDA yang dilindungi/konservasi	N.A	1 Ha	97.003.000	1 Ha	278.940.000	1 Ha	890.920.000	1 Ha	892.940.000	1 Ha	785.000.000	5 Ha	2.944.803.000	DLH	Singkawang
2.5.1.17.01		Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Terlaksananya aksi perlindungan Sumber-Sumber Air	0	0	0	1 Ha	80.000.000	1 Ha	250.000.000	1 Ha	250.000.000	1 Ha	150.000.000	4 Ha	730.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.17.06		Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	1	1	97.003.000	1	78.940.000	0	186.920.000	0	222.000.000	0	225.000.000	2	809.863.000	DLH	Singkawang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.17.xx		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	1	60.000.000	1	250.000.000	1	214.940.000	1	222.500.000	4	747.440.000	DLH	Singkawang
2.5.1.17.xx		Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan kawasan wisata	Terlaksananya Aksi perlindungan Kawasan Wisata	0	0	0	1 Ha	40.000.000	1 Ha	170.000.000	1 Ha	170.000.000	1 Ha	150.000.000	4 Ha	530.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.17.xx		Aksi mitigasi dan penurunan GRK	Jumlah kampung proklam	0	0	0	2	20.000.000	2	34.000.000	2	36000000	2	37.500.000	2	127.500.000	DLH	Singkawang
2.5.1.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Persentase ketaatan pengelolaan LH (%)	0	0	0	0	0	55	250.000.000	0	0	60	250.000.000		500.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.20.04		Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Persentase Limbah padat/cair yang tertangani	0	0	0	0	0	55	250.000.000	0	0	60	250.000.000	60	500.000.000	DLH	Singkawang

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Tujuan : Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

Sasaran : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

2.5.1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	#####	100	1.378.280.000	100	1.399.160.000	100	1.420.380.000	100	1.441.950.000	100	6.997.508.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.550.000	100	3.750.000	100	3.750.000	100	18.315.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	100	181.200.000	100	181.200.000	100	188.000.000	100	189.000.000	100	190.000.000	100	1.106.244.120	DLH	Singkawang
2.5.1.1.6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	100	100	65.045.000	100	65.045.000	100	65.272.500	100	66.500.000	100	67.500.000	100	397.106.230	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100	100	86.850.000	100	86.850.000	100	90.000.000	100	93.500.000	100	94.500.000	100	552.206.295	DLH	Singkawang
2.5.1.1.8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan	100	100	9.573.000	100	15.000.000	100	15.800.000	100	17.800.000	100	17.900.000	100	58.444.122	DLH	Singkawang
2.5.1.1.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100	100	105.925.050	100	50.000.000	100	62.500.000	100	66.480.000	100	66.520.000	100	646.685.465	DLH	Singkawang
2.5.1.1.11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	100	63.307.500	100	43.300.000	100	45.300.000	100	46.800.000	100	49.530.000	100	386.498.618	DLH	Singkawang
2.5.1.1.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	100	7.838.760	100	8.835.000	100	9.550.000	100	10.250.000	100	10.350.000	100	47.856.414	DLH	Singkawang
2.5.1.1.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	100	56.112.500	100	156.112.500	100	145.000.000	100	147.250.000	100	158.250.000	100	308.383.864	DLH	Singkawang
2.5.1.1.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.250.000	100	3.450.000	100	3.550.000	100	18.315.300	DLH	Singkawang
2.5.1.1.17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	100	100	48.537.500	100	38.588.810	100	38.588.810	100	40.000.000	100	41.500.000	100	283.352.954	DLH	Singkawang
2.5.1.1.18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100	100	332.060.690	100	332.060.690	100	337.060.690	100	339.500.000	100	340.500.000	100	2.113.620.358	DLH	Singkawang

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.1.20		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	100	100	395.288.000	100	395.288.000	100	395.288.000	100	396.100.000	100	398.100.000	100	1.975.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur (%)	100	100	#####	100	1.227.500.000	100	1.237.040.000	100	1.256.660.000	100	1.256.619.300	100	6.202.619.300	DLH	Singkawang
2.5.1.2.22		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang dipelihara	100	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	100	15.000.000	100	61.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100	100	#####	100	1.184.000.000	100	1.191.793.000	100	1.194.972.300	100	1.195.972.300	100	5.950.037.600	DLH	Singkawang
2.5.1.2.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	100	31.500.000	100	32.500.000	100	33.247.000	100	48.687.700	100	45.647.000	100	191.581.700	DLH	Singkawang
2.5.1.1.8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	100	308.450.000	100	262.170.000	100	317.250.000	100	270.090.000	100	326.310.000	100	1.484.270.000	DLH	Singkawang
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	80	28.000.000	0	0	80	35.000.000	0	0	80	40.000.000	240	103.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.9		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	210	219	230.450.000	219	212.170.000	219	225.000.000	219	220.090.000	219	223.310.000	1095	1.111.020.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.0		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	210	219	50.000.000	219	50.000.000	219	57.250.000	219	50.000.000	219	63.000.000	1095	270.250.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	12.244.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	54.244.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.2		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4.076.500	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	5.500.000	20	25.076.500	DLH	Singkawang
2.5.1.2.3		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	4.076.500	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	5	25.076.500	DLH	Singkawang

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.2.4		Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra Perangkat Daerah	1	1	4.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.091.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.5	Program Penguatan Transparansi Publik		Persentase transparansi publik	100	100	28.125.000	100	20.100.000	100	20.200.000	100	20.500.000	100	25.000.000	100	113.925.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.6		Expo Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan expo kinerja Perangkat Daerah	1	100	28.125.000	1	20.100.000	1	20.200.000	1	20.500.000	1	25.000.000	5	113.925.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.00	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Persentase Timbulan sampah yang di tangani	93.91	30	#####	30	6.849.580.000	32	8.539.260.000	34	9.978.990.000	36	10.490.500.000	36	42.777.097.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.01		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Tersusunnya dokumen pedoman umum kebijakan manajemen pengelolaan sampah	0	0	0	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	75.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Singkawang	0	0	0	3	356.000.000	27	645.000.000	27	740.000.000	5	730.000.000	62	2.471.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.04		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan PraSarana dan sarana	Cakupan pelayanan pengangkutan sampah (rasio jumlah yang terangkut perhari di bagi jumlah timbulan sampah perhari)	29,99	30	#####	30	431.880.000	32	1.038.404.000	34	994.404.000	36	1.055.404.000	36	4.376.874.150	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.08		Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	0	0	0	100	6.175.000	100	6.500.000	100	7.000.000	100	7.250.000	100	26.925.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.10		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang berkomitmen dalam menerapkan sosialisasi kebijakan pengelolaan	0	80	35000000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	47.793.650	480	172.793.650	DLH	Singkawang
2.5.1.1.5.11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan 3R	0	0	0	100	30.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	83.000.000	400	223.000.000	DLH	Singkawang
		Penyediaan data dan informasi penanganan sampah	Penyediaan Informasi Pengelolaan Lingkungan															
2.5.1.1.5.14		Penyediaan Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan	Optimalisasi pengembangan kinerja pengelolaan sampah	12	12	#####	12	5.970.525.000	12	6.754.356.000	12	8.127.586.000	12	8.552.052.350	60	35.431.504.200	DLH	Singkawang
2.5.1.2.8.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan pelayanan publik bidang Lingkungan Hidup	90	90	26.605.000	90	106.780.000	95	72.120.000	95	82.460.000	95	82.810.000	95	370.775.000	DLH	Singkawang

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.2 8.01		Penyediaan Informasi Lingkungan	Penyediaan Informasi Pengelolaan Lingkungan	0	11	10.000.000	1	50.000.000	1	14.120.000	1	16.460.000	1	16.500.000	15	107.080.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2 8.02		Penyediaan Perijinan Lingkungan	Jumlah izin bidang lingkungan yang dikeluarkan	100	100	16.605.000	100	17.605.000	100	18.000.000	100	19.500.000	100	19.560.000	100	91.270.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2 8.xx		Penyusunan pelaporan mitigasi dan GRK	Tersedianya laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	110.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2 8.xx		Penyediaan data dan informasi penanganan sampah	Penyediaan Informasi Pengelolaan Lingkungan	-	0	-	5	14.175.000	5	15.000.000	5	16.500.000	5	16.750.000	20	62.425.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 9.00	Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan ketersediaan informasi SDA dan LH (%)	N.A	90	250000000	91	606.000.000	92	294.900.000	93	316.640.000	94	341.630.000	94	1.809.170.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 9.01		Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di	Persentase sekolah yang telah menerapkan konsep berwawasan Lingkungan Hidup	0	0	0	100	106000000	100	57.000.000	100	316640000	100	341630000	100	821.270.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 9.06		Penyusunan KLHS RPJM Walikota Terpilih dan KLHS RDTR	Tersedianya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	0	1	#####	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	2	750.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 9.xx		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tersedianya RPPLH Kabupaten / kota	0	0	0	0	0	1	237.900.000	0	0	0	0	1	237.900.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Persentase pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup > 3 yang ditangani (Air), Persentase pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup > 2 yang ditangani (Lidara)	n / n	n / n	131.428.000	n / n	350.200.000	n / n	561.130.000	n / n	753.490.000	n / n	708.470.000	n / n	2.504.718.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.xx		Pengembangan Perda/Perwako Bidang LH atau Pengembangan Peraturan Lingkungan	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bidang Lingkungan Hidup	0	4	11.699.500	2	12.000.000	1	13.000.000	3	15.000.000	2	18.000.000	12	176.699.500	DLH	Singkawang

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.1 6.04		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungannya,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	100	100	20.664.000	100	27.000.000	100	35.000.000	100	38.500.000	100	48.000.000	100	176.664.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.17		Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah,kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota	100	100	11.470.400	100	17.000.000	100	23.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	96.792.300	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.xx		Pengukuran Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai	11.415.250	Status Mutu Cemar Ringan di 4	13.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai	Status Mutu Cemar Ringan di 4 sungai	15.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4	Status Mutu Cemar Ringan di 4	16.000.000	Status Mutu Cemar Ringan di 4	97.415.250	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.xx		Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	85	85,2	5.500.000	85,4	9.000.000	85,6	14.000.000	85,8	15.000.000	86	18.000.000	86	61.500.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.xx		Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan lahan	49,34	49,35	25582950	49,36	34.000.000	49,37	45.000.000	49,38	50.000.000	49,4	60.000.000	49,4	214.582.950	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.xx		Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana	Jumlah parameter yang mampu diukur	0	0	0	10	150.000.000	1	300.000.000	1	449.413.650	1	393.293.650	13	1.292.707.300	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.14		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM), RT/RW, LSM	0	1	9.617.400	1	16.000.000	2	20.000.000	3	34.000.000	4	40.000.000	11	119.617.400	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.21		Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan	Jumlah peserta/institusi yang memahami pengelolaan limbah B3	0	40	31.229.350	60	33.200.000	100	34.630.000	100	35.076.350	100	30.076.350	400	164.212.050	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.06		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pelayanan admistrasi perizinan pengumpulan Limbah B3 Skala Kota yang ditandatangani Walikota	-	1	4.249.150	2	5.000.000	2	7.500.000	2	8.500.000	2	9.500.000	9	34.749.150	DLH	Singkawang
2.5.1.1 6.01		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Masyarakat dan SKPD Kota Singkawang	0	0	0	≥60	34.000.000	≥62	55.000.000	≥64	68.000.000	≥66	45.600.000	≥66	202.600.000	DLH	Singkawang

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja akhir RPJMD		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.1.7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Cakupan kawasan SDA yang dilindungi/ konservasi	N.A	1 Ha	97.003.000	1 Ha	278.940.000	1 Ha	890.920.000	1 Ha	892.940.000	1 Ha	785.000.000	5 Ha	2.944.803.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7.01		Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Terlaksananya aksi perlindungan Sumber-Sumber Air	0	0	0	1 Ha	80.000.000	1 Ha	250.000.000	1 Ha	250.000.000	1 Ha	150.000.000	4 Ha	730.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7.06		Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	1	1	97.003.000	1	78.940.000	0	186.920.000	0	222.000.000	0	225.000.000	2	809.863.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7.xx		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	1	60.000.000	1	250.000.000	1	214.940.000	1	222.500.000	4	747.440.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7.xx		Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan kawasan wisata	Terlaksananya Aksi perlindungan Kawasan Wisata	0	0	0	1 Ha	40.000.000	1 Ha	170.000.000	1 Ha	170.000.000	1 Ha	150.000.000	4 Ha	530.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.1.7.xx		Aksi mitigasi dan penurunan GRK	Jumlah kampung proklim	0	0	0	2	20.000.000	2	34.000.000	2	36000000	2	37.500.000	2	127.500.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.0	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Persentase ketaatan pengelolaan LH (%)	0	0	0	0	0	55	250.000.000	0	0	60	250.000.000		500.000.000	DLH	Singkawang
2.5.1.2.0.04		Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair	Persentase Limbah padat/ cair yang tertangani	0	0	0	0	0	55	250.000.000	0	0	60	250.000.000	60	500.000.000	DLH	Singkawang
2.05.01.051	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi		Persentase penilaian bobot jabatan dalam penetapan standar gaji PNS	100	100	10.011.000	100	7.000.000	100	7.250.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	39.261.000	DLH	Singkawang
2.05.01.051.01.2		Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Dokumen evaluasi jabatan	1	1	10.011.000	1	4.000.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	5	26.761.000	DLH	Singkawang
2.05.01.051.0xx		Penyusunan Analisis Kompetensi Jabatan	Dokumen analisis kompetensi jabatan	0	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.250.000	1	3.250.000	4	12.500.000	DLH	Singkawang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Lingkungan Hidup	69,24	69,34	69,44	69,54	69,64	69,74	69,74
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersusunnya RPPLH kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada
4	Terigentrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada
5	Timbulan sampah yang di tangani	29,99	30,00	30,00	32,00	34,00	36,00	36,00
6	Persentase cakupan area pelayanan	9,25	9,26	9,27	22,47	67,01	100	100
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	90	90	92,50	95,00	97,50	100	100
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah,kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota	100	100	100	100	100	100	100
9	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
10	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
11	Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan lahan	49,35	49.35	49.36	49.37	49.38	49.39	49.39

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang berisi visi-misi dan arah pembangunan lingkungan hidup di Kota Singkawang yang menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja setiap tahun dalam jangka waktu 2018 – 2022.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat menuntut kemampuan sumberdaya manusia yang handal, menguasai teknologi , memiliki visi ke depan dan didukung sarana/ prasarana yang memadai untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan.

Peran Dinas Lingkungan hidup sebagai *stakeholder* pembangunan lingkungan hidup di Kota Singkawang lebih dapat ditingkatkan sehingga lebih eksis, antisipatif dan inovatif seiring dengan semakin besarnya tingkat degradasi lingkungan global yang terjadi saat ini. Pembangunan lingkungan hidup disamping menghasilkan manfaat *tangible* (dalam arti peningkatan ekonomi masyarakat) juga harus dapat menghasilkan manfaat *intangibile* (manfaat lingkungan).

Untuk mendapatkan manfaat tersebut perlu komunikasi yang intensif didasari semangat kekeluargaan yang harus terus dilaksanakan agar hasil pembangunan lingkungan hidup dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat di Kota Singkawang sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.